



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN,
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG URAIAN TUGAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG URAIAN TUGAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG URAIAN TUGAS
DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA, DAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG URAIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi saling tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah serta menyesuaikan pengaturan mengenai uraian tugas perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam beberapa peraturan bupati yang sudah tidak sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perubahan struktur organisasi perangkat daerah sehingga diperlukan penataan kembali;
- c. bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya obesitas pengaturan serta menindaklanjuti ditetapkannya beberapa Peraturan yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan beberapa Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas sudah tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA, DAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

Pasal 1

Peraturan Bupati Banjar Nomor:

1. 26 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 26);
2. 27 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 27);
3. 31 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 31);
4. 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 32); dan
5. 38 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 38),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001